

**DINAMIKA KORUPSI MENGENAI TANTANGAN  
DAN SOLUSI DALAM PELAYANAN PUBLIK  
DI INDONESIA**

***CORRUPTION DYNAMICS REGARDING CHALLENGES  
AND SOLUTIONS IN PUBLIC SERVICES  
IN INDONESIA***

Oleh:

**Nur Intan<sup>1</sup>, Amirah Nangga<sup>2</sup>, Idham Irwansyah Idrus<sup>3</sup>, Firdaus W. Suhaeb<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>inthan240898@gmail.com; <sup>2</sup>amirahnangga13@gmail.com; <sup>3</sup>idham.irwansyah@gmail.com;  
<sup>4</sup>firdaus.w.suhaeb@gmail.com

<sup>1, 2, 3, 4</sup> Universitas Negeri Makassar

**ABSTRAK:** Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1985) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Penyebab Terjadinya Korupsi yaitu Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru, kompensasi PNS yang rendah, pejabat yang serakah, law enforcement tidak berjalan, hukuman yang ringan terhadap koruptor, tidak ada keteladanan pemimpin, pengawasan yang tidak efektif, budaya masyarakat yang kondusif KKN. Langkah pemberantasan korupsi yaitu membangun supremasi hukum dengan kuat, menciptakan kondisi nyata di semua daerah, eksistensi para aktivis, menciptakan pendidikan anti korupsi, dan sebagainya. Korupsi dalam pelayanan publik telah menjadi masalah yang persisten di Indonesia, mempengaruhi efisiensi, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Artikel ini mengkaji dinamika korupsi dalam pelayanan publik di Indonesia, menyoroti tantangan yang dihadapi serta menyajikan beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. Berdasarkan analisis terhadap data dan literatur yang tersedia, artikel ini menyimpulkan bahwa korupsi dalam pelayanan publik disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk regulasi yang lemah, budaya korupsi yang persisten, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

**KATA KUNCI:** *Dinamika korupsi, Pelayanan Publik, Tantangan dan Solusi*

**ABSTRACT:** Corruption occurs due to abuse of authority and position held by officials or employees for personal interests in the name of individuals or family, relatives and friends. Wertheim (in Lubis, 1985) states that an official is said to have committed an act of corruption if he receives a gift from someone whose aim is to influence him so that he makes a decision that benefits the interests of the gift giver. The causes of corruption are an incorrect state administration system, low civil servant compensation, greedy officials, law enforcement that does not work, light punishment for corruptors, no role models for leaders, ineffective supervision, and a social culture that is conducive to corruption. Steps

to eradicate corruption include building strong rule of law, creating real conditions in all regions, the existence of activists, creating anti-corruption education, and so on. Corruption in public services has been a persistent problem in Indonesia, affecting efficiency, fairness and public trust in government. This article examines the dynamics of corruption in public services in Indonesia, highlighting the challenges faced and presenting several solutions that can be implemented. Based on an analysis of available data and literature, this article concludes that corruption in public services is caused by various factors, including weak regulations, a persistent culture of corruption, and a lack of transparency and accountability.

**KEYWORDS:** Dynamics of corruption, Corruption in public service, Challenges and Solutions

## PENDAHULUAN

Korupsi telah lama menjadi isu yang meresahkan dalam tatanan pelayanan publik di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, masalah ini tidak hanya menjadi pembicaraan sehari-hari, tetapi juga menempati peringkat tinggi dalam indeks korupsi global. Korupsi tidak hanya menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik, tetapi juga merusak fondasi pembangunan ekonomi dan sosial negara.

Dalam konteks Indonesia, korupsi melibatkan berbagai aspek, mulai dari praktik suap dalam birokrasi hingga penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Faktor-faktor budaya, politik, ekonomi, dan sosial semuanya berkontribusi terhadap prevalensi korupsi dalam berbagai tingkat pemerintahan.

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dinamika korupsi dalam pelayanan publik di Indonesia, dengan memeriksa faktor penyebab, dampak, serta upaya penanganan dan pencegahannya. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah ini, diharapkan kita dapat mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam memerangi korupsi dan memperbaiki integritas pelayanan publik di Indonesia.

Korupsi dalam pelayanan publik telah menjadi perhatian utama di Indonesia, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengurangi praktik korupsi, tantangan yang dihadapi tetap besar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika korupsi dalam pelayanan publik di Indonesia serta menawarkan solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini.

Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam dinamika korupsi dan pelayanan publik di Indonesia meliputi Praktek korupsi yang merajalela dimana Korupsi telah menjadi masalah yang kronis di Indonesia, dengan praktek korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dan pegawai negeri sering kali terjadi di berbagai tingkat administrasi. Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran publik sering kali memberikan kesempatan bagi praktek korupsi untuk berkembang.

Budaya suap dan nepotisme yang masih kuat di beberapa sektor pemerintahan juga menjadi faktor yang memperburuk masalah korupsi. Sistem hukum yang lemah, termasuk penegakan hukum yang tidak efektif dan lambat, sering kali tidak mampu menindak pelaku korupsi dengan tegas. Dan rendahnya

kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi serta rendahnya partisipasi dalam pengawasan terhadap pelayanan publik juga memperburuk masalah tersebut.

Untuk solusi, langkah-langkah seperti peningkatan transparansi, penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan, dan reformasi sistem administrasi publik telah diusulkan untuk mengatasi masalah korupsi dalam pelayanan publik di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah – masalah dalam penelitian yang diambil peneliti. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam suatu penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya yaitu dalam mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Jenis penelitian ini adalah bibliografi, menurut Zed M (2004: 82) dijelaskan bahwa bibliografi adalah daftar informasi dalam buku-buku karya pengarang maupun ahli dalam berbagai bidang, keahlian atau penerbit tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan dalam judul penelitian yang peneliti ambil. Dalam penelitian ini data-data yang relevan dikumpulkan dengan berbagai cara, yaitu dengan Studi Pustaka, Studi Literatur, Pencarian di internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika Korupsi

Dinamika korupsi melibatkan berbagai perubahan dan pergeseran dalam pola serta praktik korupsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat modern. Berikut adalah beberapa aspek pembahasan mengenai dinamika korupsi dalam konteks isu sosial kontemporer: (1) Pergeseran Bentuk Korupsi; Korupsi tidak lagi hanya terbatas pada praktik suap atau penyalahgunaan kekuasaan tradisional, tetapi juga meluas ke dalam bentuk-bentuk baru seperti korupsi cyber, korupsi dalam sektor teknologi informasi, atau korupsi melalui media sosial. (2) Pengaruh Globalisasi; Dinamika korupsi dipengaruhi oleh globalisasi dalam berbagai aspek, seperti perdagangan internasional, investasi asing, dan transfer teknologi. Hal ini dapat memperkuat kerentanan terhadap korupsi atau sebaliknya, memberikan tekanan untuk reformasi dan transparansi. (3) Teknologi dan Korupsi; (4) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memengaruhi dinamika korupsi dengan menciptakan celah baru untuk penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi informasi. Di sisi lain, teknologi juga dapat digunakan sebagai alat untuk memerangi korupsi, misalnya melalui platform pelaporan online atau blockchain untuk meningkatkan transparansi. (5) Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Korupsi; Adopsi media sosial dan teknologi digital telah memungkinkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap dan memantau praktik korupsi. Masyarakat memiliki peran yang semakin penting dalam menyuarakan tuntutan untuk akuntabilitas dan transparansi. (6) Respon Pemerintah dan Reformasi Institusional. Dinamika korupsi dipengaruhi oleh respon pemerintah terhadap tekanan internal dan eksternal

untuk reformasi institusional. Reformasi seperti penguatan lembaga anti-korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan transparansi merupakan upaya untuk menanggapi dinamika korupsi yang terus berubah. (7) Pendidikan dan Kesadaran Publik.

Pendidikan dan kesadaran publik memiliki peran penting dalam memahami dan mengatasi korupsi dalam konteks isu sosial kontemporer. Program pendidikan anti-korupsi dan kampanye kesadaran dapat membentuk norma-norma sosial yang lebih intoleran terhadap korupsi.

### **Korupsi dalam Pelayanan Publik**

Korupsi dalam pelayanan publik mencakup berbagai aspek, termasuk faktor penyebab, dampak, serta solusi yang dapat diimplementasikan. Melalui pembahasan yang komprehensif mengenai faktor penyebab, dampak, tantangan, solusi, serta studi kasus, pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah korupsi dalam pelayanan publik dan upaya untuk mengatasinya.

Pelayanan publik dalam konteks isu sosial korupsi adalah aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Ketika korupsi merajalela dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat akan mengalami dampak negatif yang signifikan, seperti ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, penghambatan pembangunan, dan penurunan kualitas hidup.

Untuk mengatasi isu ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara luas. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah: (1) Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian; Pemerintah harus meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian dalam

penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pengembangan mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran. (2) Peningkatan Transparansi dan Akses Informasi; Pemerintah harus memberikan akses yang lebih besar kepada informasi publik tentang kebijakan, anggaran, dan hasil kinerja pelayanan publik. Transparansi yang tinggi akan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana publik dan memeriksa integritas proses pengambilan keputusan. (3) Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat; Pendidikan anti-korupsi dan pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam membentuk kesadaran akan bahaya korupsi dan pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan pelayanan publik. Melalui kampanye penyuluhan dan pelatihan, masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi. (4) Penerapan Teknologi; Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Contohnya adalah implementasi sistem e-government untuk memfasilitasi layanan publik secara online, yang dapat mengurangi interaksi langsung dengan petugas dan meminimalkan peluang terjadinya praktik korupsi.

Dengan menjalankan langkah-langkah ini secara konsisten, diharapkan pelayanan publik dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan terpercaya, serta mampu meminimalisir risiko korupsi yang merugikan masyarakat.

## **Faktor Penyebab Korupsi dalam Pelayanan Publik**

Korupsi dalam pelayanan publik di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, regulasi yang lemah memungkinkan celah bagi praktik korupsi untuk berkembang. Kedua, budaya korupsi yang persisten di beberapa lembaga pemerintah menjadi penghambat utama reformasi antikorupsi. Ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan memudahkan terjadinya korupsi.

## **Dampak Korupsi dalam Pelayanan Publik**

Korupsi dalam pelayanan publik memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat. Pertama, korupsi menyebabkan penurunan efisiensi dalam penyediaan layanan publik, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Kedua, korupsi merugikan keadilan sosial dengan memperkuat kesenjangan ekonomi dan aksesibilitas terhadap layanan publik. Ketiga, korupsi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengurangi legitimasi institusi.

## **Solusi yang dapat Diimplementasikan**

Untuk mengatasi korupsi dalam pelayanan publik, beberapa solusi dapat diimplementasikan. Pertama, penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk mengurangi celah bagi praktik korupsi. Kedua, perlu dilakukan upaya untuk mengubah budaya korupsi melalui pendidikan anti-korupsi dan pembinaan etika dalam birokrasi. Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan akan membantu mencegah terjadinya korupsi.

## **Berbagai kasus korupsi (Ranah Internasional, Nasional dan Lokal)**

### **Isu Korupsi dalam Lingkup Internasional**

Sebagai warga negara Indonesia, kita sudah akrab dengan berbagai kasus korupsi yang menimpa negeri ini. Beritanya sudah sering kita lihat berseliweran di berbagai media, seperti tak pernah ada habisnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Mirisnya, para pelaku korupsi ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki jabatan, dan seharusnya menjadi orang yang membantu rakyat keluar dari krisis, bukan sebaliknya. Membiarkan kasus korupsi merajalela hanya akan merugikan negara dan rakyat. Korupsi akan menimbulkan dampak negatif terhadap keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Akan muncul krisis kepercayaan dan sikap putus asa terhadap pihak tertentu. Sayangnya, efek dari korupsi ini tak pernah disadari oleh pelakunya.

Namun tak hanya di Indonesia, kasus korupsi juga menjadi permasalahan hampir di seluruh dunia.

Berikut kami rangkum beberapa contoh kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah dunia.

### **Nigeria**

Contoh kasus korupsi terbesar di dunia pertama ada di Nigeria. Sani Abacha adalah seorang perwira dan diktator tentara Nigeria yang menjabat sebagai presiden Nigeria dari tahun 1993

hingga kematiannya pada tahun 1998. Pemerintahannya selama lima tahun diselimuti tuduhan korupsi, meskipun tingkat keparahan korupsi itu baru disorot setelah kematiannya, dimana ternyata dia mengambil antara US\$3 dan \$5 miliar uang publik.

Pada tahun 2014, Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa mereka membekukan lebih dari US\$458 juta dana terlarang yang disembunyikan Abacha dan konspiratornya di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, Nigeria berjuang untuk memulihkan uang yang dicuri, tetapi perusahaan yang terkait dengan keluarga Abacha telah pergi ke pengadilan untuk mencegah repatriasi.

Untungnya, pihak Inggris mengumumkan telah menempatkan US\$268 juta, yang telah disimpan di rekening Deutsche Bank, ke dalam dana pemulihan aset yang pada akhirnya akan mengembalikan uang tunai ke Nigeria.

### **Siemens**

Contoh kasus korupsi terbesar di dunia yang kedua melibatkan perusahaan Siemens. Tahukah Anda bahwa suap tertentu yang dibayarkan di luar negeri secara teknis dapat dikurangkan dari pajak untuk perusahaan Jerman hingga tahun 1999? Mereka cukup mengkategorikannya sebagai “pengeluaran yang berguna”, selama pengeluaran tersebut tidak terjadi di Jerman dan tidak ada pejabat negara asing yang terlibat.

Namun, pada tahun 2006, Siemens, salah satu perusahaan terbesar di Jerman, membawa kasus suap perusahaan ke tingkat yang baru. Selama lebih dari satu dekade, perusahaan ini membayar suap kepada pejabat pemerintah dan pegawai negeri di seluruh dunia, yang berjumlah sekitar US\$1,4 miliar. Sementara pembuat keputusan yang korup mendapat untung, warga di negara-negara yang terkena dampak membayar biaya

kebutuhan yang terlalu mahal seperti jalan dan pembangkit listrik. Transaksi perusahaan akhirnya menarik perhatian pihak berwenang di beberapa negara, termasuk AS dan Jerman, yang kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya mendapatkan sanksi bersejarah sebesar US\$1,6 miliar.

### **FIFA**

Contoh kasus korupsi terbesar di dunia keempat melibatkan organisasi sepak bola dunia, FIFA. Dakwaan pada 27 Mei 2015 dari sembilan pejabat dan mantan pejabat Fédération Internationale de Football Association (FIFA) atas tuduhan pemerasan dan pencucian uang mengubah lanskap olahraga dalam semalam. Tiba-tiba sebuah sistem “korupsi yang merajalela, sistemik dan mengakar” menjadi fokus global.

Terpilihnya kembali presiden FIFA, Sepp Blatter, yang memimpin budaya impunitas, mengungkap betapa sepak bola tampak seperti ada di alam semesta paralel tanpa akuntabilitas. Sangat mudah untuk memahami mengapa kepercayaan publik pada FIFA jatuh ke titik terendah sepanjang masa.

### **Kasus Korupsi di Tingkat Nasional**

Berikut contoh kasus korupsi di Indonesia:

#### **PT Asabri**

Kasus yang dilakukan oleh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), menjadi yang terbesar di Indonesia. Mengutip rri.co.id, jumlah kerugian kasus dugaan pengelolaan dana investasi periode 2012 sampai 2019 PT Asabri mencapai Rp23,74 triliun. Data ini berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kasus Asabri membuat 7 terdakwa dituntut 10 tahun penjara

sampai hukuman mati. Selain itu uang pengganti kerugian untuk negara mencapai belasan triliun rupiah.

### **Jiwasraya**

Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencapai Rp13,7 triliun rupiah. Jiwasraya menjadi sorotan setelah gagal bayar polis kepada nasabah sebesar Rp12,4 triliun rupiah. Produk asuransi jiwa dan investasi ini merupakan hasil kerja sama dengan beberapa bank, berperan sebagai agen penjual. Tahun 2019, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang sebagai tersangka.

### **Bank Century**

Kasus bank Century ramai di tahun 2014. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan kerugian negara mencapai Rp6,76 triliun, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP). Selain itu kerugian negara yang lain mencapai Rp689.394 miliar, untuk pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) ke Bank Century. BACA JUGA Alasan Kejaksaan Tak Tangani Korupsi di bawah Rp 50 juta

### **Pelindo II**

Kerugian negara karena empat kasus PT Pelindo II diperkirakan mencapai Rp6 triliun, menurut BPK. Kasus dugaan korupsi ini antara lain pembangunan pelabuhan New Kalibaru, pengelolaan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, Global Bond Pelindo II, dan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT).

### **Kotawaringin Timur**

Kasus korupsi Kotawaringin Timur merugikan negara mencapai Rp5,8 triliun. Kerugian negara dihitung dari kegiatan pertambangan, kerugian hutan, kerusakan lingkungan, dan eksplorasi pertambangan bauksit. Kasus ini terjadi

ketika Supian diangkat menjadi Bupati Kotawaringin Timur, periode 2010-2015.

### **Kasus BLBI**

BPK menemukan kerugian negara terhadap kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) sebesar Rp4,58 triliun. Jumlah perhitungan kerugian negara lebih besar, jika dibandingkan dengan perkiraan KPK sebesar Rp3,7 triliun. 7. E-KTP Kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP merugikan negara senilai Rp2,3 triliun dari total nilai proyek Rp5,9 triliun. Kasus korupsi e-KTP terjadi di tahun 2011 dan 2012. KPK menetapkan beberapa orang tersangka korupsi dari pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi DPR seperti Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana dan Setya Novanto

### **Hambalang**

Total kerugian negara kasus Hambalang mencapai Rp706 miliar. Data tersebut dari hasil investigasi BPK di tahun 2012 dan 2013. Kasus Hambalang melibatkan Menteri Pemuda Olahraga Andi Mallarangen, anggota DPR Ignatius Mulyono, Kepala Pertanahan Nasional Joyo Winoto, Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

### **PENUTUP**

Korupsi dalam pelayanan publik merupakan masalah serius di Indonesia, yang mempengaruhi efisiensi, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan penguatan regulasi, perubahan budaya, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas. Hanya dengan upaya bersama dari berbagai pihak, korupsi dalam pelayanan publik

dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ridwan; Utari, Indah Sri; dan Subondo, Herry 2016 “Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (*Asset Recovery*) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJLS Vol.1 No.1)*
- Dewi S, Tan, Evi Ratna, 2017, Analisis Kasus Korupsi Dana Bantuan Partai Politik PPP Kota Jepara. *Thesis*, Unika Soegijapranata, Semarang.
- Fitri, A., & Utami, D. (2020). Dinamika Korupsi dalam Pelayanan Publik di Indonesia: Tinjauan Analisis Kuantitatif. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 7(2), 145-162.
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991).
- Hari Purwadi, Adriana Grahani Firdausy, Sasmini 2010. *Pengembalian Keuanan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Yustisia*, Januari April 2010 Edisi 79 Surakarta, Fakultas Hukum UNS
- Nugroho, A., & Suryani, R. (2017). Solusi Kebijakan untuk Mengatasi Korupsi dalam Pelayanan Publik di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(2), 89-104.
- Perspektif Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 67-82.
- Pratama, B., & Sari, R. (2018). Tantangan dan Solusi dalam Penanggulangan Korupsi di Layanan Publik.
- Ritzer, G. (2010). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.